



KEBIJAKAN NUKLIR KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN KIM JONG-UN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS INTERNASIONAL

Matheo Manoe, Triesanto Romulo Simanjuntak, Putri Hergianasari

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi,

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak

Korea Utara merupakan salah satu negara yang aktif mengembangkan kebijakannya militernya, khususnya dalam hal pengembangan senjata nuklir. Pada masa pemerintahan Kim Jong-Un, kebijakan nuklir Korea Utara dinilai semakin agresif, ditambah dengan ekspansi kebijakan tersebut dalam skala besar. Namun, kebijakan nuklir Korea Utara mendapat penolakan dari berbagai aktor internasional karena dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dampak dari kebijakan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-Un terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dianalisis melalui secondary analysis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan teori realisme defensif dan balance of power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nuklir Korea Utara dapat mengganggu stabilitas kawasan karena adanya persepsi ancaman yang mendorong masing-masing negara untuk mengembangkan kapabilitas militernya sehingga terjadi perlombaan senjata di kawasan Asia Pasifik dan memunculkan alasan bagi negara untuk melakukan tindakan preemtif dengan alasan keamanan.

Kata Kunci: Korea Utara, kebijakan nuklir, realisme defensif, balance of power, Asia Pasifik.

PENDAHULUAN

Korea Utara merupakan salah satu negara yang menjadi bahan pembicaraan dalam forum internasional, terlebih ketika membahas kebijakan nuklir yang diterapkan. Namun, perlu diketahui bahwa kebijakan nuklir Korea Utara memiliki kepentingan di dalamnya (Syahrin, 2018). Nuklir merupakan sarana bagi Korea Utara agar mampu menunjukkan eksistensi dalam diplomasi internasional, serta menjadi alat dalam pengambilan kebijakan demi kepentingan rezim. Meskipun dikecam oleh dunia internasional, Korea Utara tetap menjalankan misi pengembangan senjata nuklir secara swadaya, karena itu menjadi suatu cara untuk menghadapi negara adidaya seperti Amerika Serikat yang dapat mengancam kedaulatan mereka (Syahrin, 2018).

Pengembangan nuklir pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Kim Il-Sung dengan pembangunan kompleks nuklir di Yonghyeon. Kompleks nuklir tersebut hingga saat ini menjadi basis pengadaan senjata bagi Korea Utara. Pada masa pemerintahan Kim Jong-Il, ancaman nuklir Korea Utara semakin meningkat, sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk menerjunkan kekuatan militer demi membendung kekuatan nuklir Korea Utara, tetapi hal tersebut tidak membuat Korea Utara menghentikan pengembangan nuklirnya. Sepeninggal Kim Jong-Il, Korea Utara semakin menggencarkan pengembangan senjata nuklirnya dengan melakukan peluncuran nuklir untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah pada Februari 2013 (Nasution, 2018).

Sejak 2012, Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-Un. Dia mengeluarkan beberapa kebijakan terkait nuklir, dengan menyatakan bahwa Korea Utara tidak mengubah arah kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya dalam hal nuklir. Korea Utara tetap menggunakan nuklir untuk menjaga keamanan negara seperti

yang dilakukan oleh Kim Jong-Il. Kim Jong-Un menganggap bahwa tanpa dibekali senjata nuklir, mustahil bagi Korea Utara untuk menanamkan pengaruhnya dalam dunia internasional (Ardhila, 2013). Di samping itu, Korea Utara juga mengembangkan senjata nuklir dengan tujuan untuk menjalin diplomasi dengan Korea Selatan, meraih atensi dari Amerika Serikat, memperkuat legitimasi Kim Jong-Un, serta melakukan perlawanan terhadap Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang (Tan, 2019).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dampak kebijakan nuklir Korea Utara terhadap dunia internasional, mengingat Korea Utara merupakan salah satu negara pemilik nuklir yang sedang mendapat pemantauan dari dunia internasional karena mengancam stabilitas dunia (Purwono & Zuhri, 2010). Peluncuran senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menyebabkan keresahan bagi dunia internasional, khususnya negara-negara di Asia Timur, karena dapat mengancam keamanan dan menimbulkan konflik keamanan secara bilateral maupun multilateral.

Realisme Defensif

Realisme defensif merupakan suatu cabang dari pandangan neorealisme dan neoklasik realisme yang berkembang setelah terjadi perdebatan antara neorealis dengan neoliberalis terkait kooperasi dan keuntungan yang akan diperoleh suatu negara.

Menurut pandangan realisme defensif, kekuasaan merupakan suatu alat untuk mencapai kekuasaan, bukan tujuan utama dari suatu negara, karena tujuan utama dari suatu negara adalah keamanan. *Status quo* suatu negara dalam melakukan kerja sama dipengaruhi oleh *security dilemma* yang dihadapi oleh kedua negara tersebut. *Security dilemma* juga dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara

lainnya (Nie, 2016), apakah negara tersebut memiliki niat untuk melakukan kebijakan defensif atau sebaliknya. *Security dilemma* merupakan suatu keadaan yang terjadi antara dua negara defensif yang sama-sama tidak berniat untuk saling menyerang, namun memiliki kekhawatiran akan masa depannya masing-masing (Atland, 2014).

Balance of Power

Balance of power merupakan teori yang pertama kali dicetuskan oleh Walt yang menjelaskan bahwa pembentukan aliansi merupakan salah satu respon dari suatu negara terhadap ancaman yang akan atau sedang dihadapinya. Perspektif neorealistik memandang *balancing* dilakukan oleh suatu negara untuk menghindari dominasi negara atau koalisi yang dipandang sebagai suatu ancaman (Lestari & Yuniyanto, 2013).

Perspektif realistik memandang *balance of power* sebagai suatu cara yang bersifat *power-centered* atau berpusat pada kekuasaan. *Balance of power* merupakan pembagian kekuatan secara rata dan dikendalikan secara adil oleh suatu koalisi yang ingin mempertahankan atau menghancurkan *status quo*. Menurut perspektif realistik pula, tujuan dari suatu kebijakan internasional adalah demi mencapai suatu kekuatan politik, salah satunya adalah *balance of power*. *Balance of power* merupakan alternatif satu-satunya untuk mencegah negara adidaya memiliki kekuatan yang terlalu besar dan membuat negara yang lebih lemah merasa terancam (Shany, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Keduanya dipilih karena penulis ingin memperoleh informasi lebih konkret mengenai kebijakan nuklir yang diterapkan oleh

pemerintah Korea Utara terhadap stabilitas internasional. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan melibatkan jurnal, buku, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya terkait topik penelitian yang diperoleh melalui kajian pustaka. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik *secondary analysis* yang merupakan strategi penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korea Utara di Bawah Kepemimpinan Kim Jong-Un

Kim Jong Un pertama kali diumumkan sebagai penerus kepemimpinan ayahnya, Kim Jong Il, pada tahun 2008 dan secara resmi naik ke pemerintahan pada tahun 2011. Dalam beberapa tahun pemerintahannya, Kim Jong Un justru menunjukkan obsesinya terhadap *power* dan membuat kondisi domestik Korea Utara semakin memburuk (Larsen, 2021). Obsesi Kim Jong Un terhadap *power* ditunjukkan dengan pergeseran kekuatan dalam pemerintahan, dari yang semula berdasar pada militer beralih kepada partai politik pendukung Kim Jong Un, untuk mengurangi pengaruh politik dari pihak militer. Perubahan tersebut dilakukan karena Kim Jong Un menganggap bahwa keberlangsungan rezimnya berkaitan erat dengan kebijakan militer yang ia keluarkan sehingga Kim Jong Un perlu untuk memiliki kendali penuh terhadap militer. Selain itu, Kim Jong Un menganggap besarnya pengaruh militer, seperti pada era Kim Jong Il dimana militer dikuasai oleh KPA (Korean People's Army), dalam jangka panjang dapat memunculkan ancaman perlawanan terhadap pemerintahan Kim Jong Un (Park, 2015).

Kebijakan militer Kim Jong Un ditandai dengan intensifikasi pembangunan persenjataan nuklir,

diawali dengan revisi konstitusi Korea Utara yang selanjutnya melegitimasi Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir, diwujudkan dengan peningkatan frekuensi pengujian persenjataan nuklir. Di samping itu, kebijakan militer Kim Jong Un juga terfokus pada pengembangan kapabilitas asimetris, yaitu dengan memperkuat strategi militer yang spesifik, seperti penggunaan *weapon of mass destruction* (WMD), terorisme, serta gabungan antara strategi konvensional dan gerilya. Kapabilitas asimetris dinilai sebagai aspek yang paling tepat untuk diterapkan di Korea Utara, melihat perbedaan yang signifikan antara Korea Utara dan negara-negara di sekitarnya dalam hal militer dan ekonomi (Park, 2015).

Namun, kebijakan Kim Jong Un yang agresif di bidang militer memberikan dampak buruk pada kondisi domestik, khususnya pada sektor ekonomi. Pada tahun 2013, Kim Jong Un mengeluarkan kebijakan *Byungjin* yang menegaskan penggabungan dua tujuan strategis, yaitu pembangunan ekonomi dan pengembangan nuklir. Hingga tahun 2020, Korea Utara telah menunjukkan pertumbuhan persenjataan nuklir yang signifikan. Sebaliknya, tidak ada data pasti terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi Korea Utara. Bahkan, GDP Korea Utara justru menurun drastis sejak tahun 2016, dimana pada tahun 2016 GDP Korea Utara mengalami peningkatan sebesar 3,9%, tetapi pada tahun 2018 GDP Korea Utara mengalami penurunan hingga -4,1% (Ernst & Kim, 2020).

Sejarah Kebijakan Nuklir Korea Utara

Program nuklir Korea Utara telah dilaksanakan sejak tahun 1956, ketika Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani perjanjian kerja sama terkait proyek riset nuklir. Menindaklanjuti perjanjian tersebut,

pada tahun 1959, Korea Utara kembali menandatangani protokol tambahan dengan Uni Soviet terkait penggunaan energi nuklir. Protokol tersebut memberi kesempatan bagi Uni Soviet untuk mengirimkan reaktor dan peralatan nuklir lainnya ke Pyongyang dengan alasan riset. Mundurnya Uni Soviet dari Kuba pada tahun 1962 membuat Korea Utara khawatir jika negara tersebut akan ditinggalkan oleh pelindungnya, yaitu Uni Soviet. Oleh karena itu, Korea Utara melihat senjata nuklir sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan Korea Utara di masa itu (Wakefield & Hathaway, 2010).

Pada awal dekade 1960-an, Korea Utara membangun fasilitas nuklir pertamanya yang berada 90 kilometer dari Pyongyang. Fasilitas tersebut yang kemudian menjadi Komplek Riset Nuklir Yongbyon. Pasca dibentuknya Komplek Yongbyon, program nuklir Korea Utara berkembang dengan pesat, khususnya sejak tahun 1970-an (Mansourov, 1995). Tidak hanya di Yongbyon, Korea Utara juga membangun fasilitas nuklir di delapan wilayah lainnya. Ekspansi yang agresif tersebut didukung oleh keadaan perkembangan ekonomi Korea Selatan yang signifikan, kebutuhan Korea Utara untuk lepas dari pengaruh Uni Soviet dan Tiongkok, serta keinginan Kim Il Sung untuk meninggalkan warisan bagi penerusnya, Kim Jong Il (Wakefield & Hathaway, 2010).

Di bawah tekanan Uni Soviet, Korea Utara bergabung dalam *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1985. Korea Utara juga menandatangani perjanjian pengamanan nuklir dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) pada tahun 1992 karena banyaknya tekanan dari komunitas internasional terkait pengembangan program nuklir Korea Utara. Berdasarkan perjanjian tersebut, Korea Utara menerima inspeksi terkait fasilitas nuklirnya di Yongbyon (Mansourov, 1995). Pada tahun 2003,

Korea Utara menyatakan mengundurkan diri dari NPT karena kepentingan keamanan.

Akan tetapi, pada Oktober 2006, Korea Utara berhasil melakukan percobaan nuklir pertamanya dan menyatakan jika Amerika Serikat terus memberikan tekanan bagi Korea Utara, tekanan tersebut akan diterjemahkan sebagai deklarasi perang. Korea Utara beranggapan bahwa 'reaksi' yang ia berikan merupakan hal yang legal dan diterima oleh banyak negara, karena Korea Utara hanya menanggapi serangan dari Amerika Serikat. Namun, percobaan nuklir tersebut justru mendorong penolakan dari semua negara di dunia, kecuali Iran.

Bahkan, di Jepang dan Korea Selatan, percobaan nuklir tersebut turut memengaruhi masyarakat setempat, yang mendorong kedua negara untuk menghentikan perdagangan dan program bantuan luar negeri ke Korea Utara sepenuhnya (Romashkina, 2007). Di samping itu, PBB juga turut memberikan sanksi atas tindakan Korea Utara tersebut, termasuk di antaranya adalah larangan terkait perdagangan dan perjalanan ke luar negeri (CNN, 2006).

Kebijakan Nuklir Korea Utara pada Masa Pemerintahan Kim Jong-Un

Di bawah pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara mendeklarasikan diri sebagai negara yang bersenjata nuklir di dalam Pembukaan Konstitusi negara. Bahkan, Korea Utara juga mengadopsi *Nuclear Weapons State Law* yang secara garis besar menyatakan bahwa senjata nuklir yang dikembangkan Korea Utara hanya digunakan sebagai *deterrence* dan tidak akan digunakan untuk agresi terhadap negara lain.

Korea Utara terus berupaya untuk mengembangkan kapabilitas nuklirnya. Korea Utara juga dinilai berupaya untuk memperkecil ukuran

peralatan perangnya dengan tujuan agar alat-alat tersebut dapat digabungkan dengan mudah bersama rudal. Percobaan nuklir Korea Utara yang kelima pada September 2016 merupakan percobaan untuk memverifikasi teknologi dan kapabilitas dari peralatan perang yang lebih kecil (Kim, 2017). Dalam periode tahun 2013-2017, Kim Jong Un telah melakukan empat kali percobaan nuklir, ditambah dengan 125 percobaan rudal (Council on Foreign Relations, 2021).

Pada 3 September 2017, Korea Utara melaksanakan percobaan senjata nuklirnya di Punggye-ri. Selanjutnya, Kim Jong Un mengklaim bahwa Korea Utara memiliki *intercontinental ballistic missile* (ICBM) baru yang disebut dengan Hwasong-15, yang mampu mengangkut senjata nuklir ukuran besar dan menghancurkan seluruh daratan Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Presiden Donald Trump menyatakan akan mencegah serangan militer Korea Utara, termasuk dengan menggunakan tindakan militer (Friedman, 2017).

Korea Utara menyatakan akan menghentikan segala aktivitas percobaan nuklirnya pada April 2018 karena anggapan bahwa mereka berhasil memverifikasi kapabilitas dari senjata yang mereka miliki. Namun, pada awal tahun 2020, Kim Jong Un mengumumkan akan meneruskan percobaan nuklir dan rudal jarak jauhnya. Walaupun demikian, Kim Jong Un menyatakan skala percobaan senjata tersebut bergantung pada sikap Amerika Serikat terhadap Korea Utara, karena dalam beberapa tahun sebelumnya, Amerika Serikat enggan untuk menghentikan sanksi yang diterapkan kepada Korea Utara hingga negara tersebut benar-benar menghentikan program nuklirnya (BBC News, 2020).

Dampak Kebijakan Nuklir Korea Utara pada Masa Pemerintahan

Kim Jong-Un terhadap Stabilitas Kawasan Asia Pasifik

Menghilangkan Deterrence di Kawasan Semenanjung Korea

Kapabilitas nuklir Korea Utara yang meningkat membuat negara tersebut mengubah strategi *deterrence* yang dimilikinya sebelumnya. Umumnya, strategi *deterrence* digunakan untuk mempertahankan *status quo* dengan cara memengaruhi musuh untuk menahan provokasi militernya demi menghindari konsekuensi yang merugikan dalam skala besar. Tanpa adanya dialog pun, *deterrence* dengan menggunakan nuklir dapat menjadi salah satu cara negosiasi bagi negara-negara yang terlibat, dengan maksud senjata nuklir akan digunakan jika musuhnya tidak memahami kepentingan dari suatu negara.

Hilangnya *deterrence* di Semenanjung Korea ditandai dengan dibukanya dialog oleh Korea Utara, baik dengan Amerika Serikat ataupun Korea Selatan. Dengan Korea Selatan, Korea Utara mengadakan pertemuan tingkat tinggi terkait denuklirisasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa Korea Utara siap menghancurkan fasilitas nuklirnya di Punggye-ri. Tidak hanya itu, pertemuan yang dilakukan antara Kim Jong-Un dan Moon Jae-In juga berdampak pada meningkatnya hubungan antara kedua negara sehingga mengurangi *deterrence* di kawasan Semenanjung Korea (Anastasia & Yuniasih, 2020).

Selain itu, hilangnya *deterrence* juga berdampak pada munculnya dialog antara Korea Utara dengan Amerika Serikat pada tahun 2018. Dialog ini membahas berbagai poin seperti normalisasi hubungan, denuklirisasi, perdamaian, dan tahanan perang, disusul dengan pertemuan antara pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat pada tahun 2019 yang tidak menghasilkan apapun karena adanya ketidaksetujuan dari pihak Pyongyang terkait

denuklirisasi (Congressional Research Service, 2021).

Korea Utara tidak lagi memandang *nuclear deterrence* sebagai cara untuk mempertahankan keamanan nasional dan keberlangsungan rezim, tetapi juga untuk mengubah keseimbangan militer di Semenanjung Korea dan memengaruhi Korea Selatan secara koersif (Kim, 2017). Untuk itu, Korea Utara menargetkan Korea Selatan sebagai negara yang bergantung penuh pada *deterrence* dari Amerika Serikat.

Kerentanan Korea Selatan akibat *deterrence* tersebut, ditambah dengan kepemilikan nuklir Korea Utara, membuat kondisi di Semenanjung Korea menjadi tidak stabil. Hal tersebut karena Korea Utara terus melakukan provokasi dalam intensitas kecil untuk menunggu lawannya menyerang terlebih dahulu sebagai justifikasi penggunaan senjata nuklir. Akibatnya, baik Korea Selatan ataupun Amerika Serikat tidak bisa gegabah dalam melakukan retaliasi, dan justru membuat Korea Selatan menjadi tawanan nuklir (*nuclear hostage*).

Terlebih, Amerika Serikat memiliki pertimbangan yang sulit untuk melakukan serangan preemtif karena retaliasi dari Korea Utara, baik secara konvensional ataupun menggunakan nuklir, dapat memberi dampak buruk bagi kawasan, khususnya negara-negara aliansinya. Korea Utara selanjutnya menggunakan provokasi militer dan ancaman nuklirnya untuk memaksimalkan keuntungan dalam hubungan antar-Korea. Salah satu contoh adalah permintaan Korea Utara yang terus-menerus untuk meningkatkan upah di Komplek Industri Gaesong sejak 2009. Pada tahun 2016, Korea Selatan menutup komplek industri tersebut sepenuhnya setelah Korea Utara melakukan percobaan nuklirnya untuk yang keempat kali (Kim, 2017).

Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik

Kebijakan nuklir Korea Utara pada rezim Kim Jong-Un tidak hanya berdampak pada bagaimana hubungan Pyongyang dengan Korea Selatan dan negara di sekitarnya, tetapi juga dapat memicu munculnya *security dilemma* di kawasan. Munculnya *security dilemma* di kawasan Asia Pasifik diakibatkan oleh aktivitas Korea Utara dalam mengembangkan rudal balistik dan nuklirnya untuk meningkatkan posisi tawarnya. Tidak hanya itu, tidak tercapainya kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi Korea Utara-Amerika Serikat di tahun 2018 dan 2019 juga memicu *security dilemma* karena tidak adanya komitmen dari Amerika Serikat (Tan & Park, 2020).

Permasalahan nuklir Korea Utara yang tidak kunjung terselesaikan pun membawa persepsi ancaman bagi Korea Selatan dan Jepang (Moon & Jeong, 2021). Pemerintah Korea Selatan sebelumnya berupaya untuk menyelesaikan tensi yang ada melalui diplomasi, tetapi banyak elit politik yang mengusulkan untuk mengembangkan senjata nuklir yang independen. Bagi mereka, konsep 'nuklir untuk nuklir' merupakan solusi yang paling tepat untuk menanggapi ancaman dari Korea Utara dan pandangan tersebut mendapat dukungan besar dari masyarakat. Terlebih adanya kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk menarik pasukan militernya dari Korea Selatan dan mengizinkan Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklirnya sendiri.

Di sisi lain, Jepang yang sebelumnya menganggap proliferasi nuklir merupakan hal yang tabu akibat tragedi Hiroshima dan Nagasaki, saat ini beranggapan bahwa pengembangan senjata nuklir independen merupakan hal yang diperlukan. Akan tetapi, adanya ancaman dari Korea Utara, pertumbuhan pengaruh dan kapabilitas Tiongkok, serta anggapan bahwa komitmen Amerika Serikat di Jepang berkurang

turut menjadi alasan bagi Jepang untuk menerapkan *nuclear deterrence*. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2016, Jepang diketahui membeli 47,8 ton plutonium dan 1,5 ton uranium yang merupakan bahan dasar pembuatan senjata nuklir (Moon & Jeong, 2021).

Meskipun senjata nuklir Korea Utara tidak menciptakan domino nuklir di kawasan, tetapi pengembangannya dapat memperburuk *security dilemma* dari negara-negara di kawasan Asia Timur yang kemudian mendestabilisasi hubungan regional. Ancaman nuklir Korea Utara akan memperkuat aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi kepentingan Tiongkok. Besar kemungkinan bagi Tiongkok untuk ikut mengembangkan senjata nuklirnya demi mempertahankan *deterrent* yang efektif terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat kemungkinan akan merespons dengan meningkatkan presensi militernya di kawasan. Dengan demikian, tensi akan terus meningkat dan menimbulkan ketidakstabilan di kawasan (Lee, 2008).

Keputusan Untuk Perang Preemptif

Kondisi *security dilemma* dapat mendorong kemungkinan terjadinya perang preemptif atau perang preventif. Perang preemptif merupakan sebuah kondisi dimana sebuah serangan dapat diluncurkan lebih awal atas dasar perkiraan bahwa musuh akan menyerang atau mempersiapkan serangan terlebih dahulu (Mueller, *et al.*, 2006). Serangan secara preemptif dapat menyebabkan musuh tidak dapat mempersiapkan kemampuan perangnya secara maksimal sehingga tidak dapat mencegah serangan yang ada.

Korea Utara memiliki kapabilitas untuk melakukan serangan terlebih dahulu ke aliansi Amerika Serikat di kawasan, misalnya Korea Selatan.

Sebagai contoh, di Seoul, Korea Selatan, terdapat 42.334 penduduk per mil persegi dengan GRDP (*Gross Regional Domestic Product*) mencapai 22,8% dari total GDP nasional Korea Selatan. Serangan ke Seoul dapat memberikan dampak yang signifikan bagi Korea Selatan, yang bahkan dapat meluas ke negara lainnya (Lee, 2008).

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki kapabilitas persenjataan nuklir yang modern dan dinilai dapat menghancurkan seluruh fasilitas nuklir di Pyongyang, ditambah dengan sistem pertahanan rudal yang diperkirakan dapat menghancurkan Korea Utara secara keseluruhan. Amerika Serikat menilai bahwa sistem pertahanan non-nuklirnya tidak mampu untuk menghadapi serangan nuklir dari Korea Utara sehingga serangan preemtif ke fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara dapat menjadi solusi agar Amerika Serikat dapat mengantisipasi serangan balasan dari Korea Utara (Kim, 2006). Berdasarkan kondisi tersebut, Amerika Serikat dapat membatasi kerusakan yang dihadapi jika melakukan serangan preemtif.

Dari sisi Korea Utara, nuklir merupakan senjata yang rentan. Hal tersebut karena lokasi senjata nuklir Korea Utara dapat diprediksi akibat persiapannya yang memakan waktu lama dan dapat dihancurkan di tempat. Di samping itu, ukuran dari penyimpanan senjata Korea Utara pun kecil sehingga serangan seminim apapun dapat mengurangi kapabilitas nuklirnya secara drastis. Oleh karena itu, pemimpin Korea Utara pun memiliki mentalitas "*use-it-or-lose-it*" sehingga serangan preemtif menjadi solusi yang menarik dibandingkan menghadapi serangan ofensif dari lawan (Lee, 2008).

Dampak terhadap Stabilitas Kawasan Asia-Pasifik

Korea Utara menggunakan nuklir sebagai *deterrence* untuk

menghindari serangan dari negara lain. *Deterrence* yang digunakan oleh Korea Utara dilakukan dengan memanfaatkan pengembangan nuklir dan rudal jarak jauhnya, yang mana langkah ini dapat mengganggu keamanan negara di sekitarnya. Pengembangan persenjataan yang dilakukan dalam kebijakan nuklir Korea Utara membuat kekuatan yang dimiliki oleh Pyongyang menjadi lebih maju. Hal ini dimanfaatkan oleh Korea Utara untuk membujuk Korea Selatan dan Jepang agar dapat menahan Amerika Serikat sehingga Washington tidak akan melangkah lebih jauh dalam mengancam keamanan nasional Korea Utara.

Kebijakan nuklir sebagai *deterrence* juga dapat dilihat sebagai upaya Pyongyang untuk memaksa Korea Selatan dan Jepang agar tidak mendukung Amerika Serikat dalam persetujuannya dengan Korea Utara (Roberts, 2020). Oleh karena itu, negara-negara lain akan berpikir ulang untuk melakukan serangan kepada Korea Utara sehingga membentuk norma dalam penyeimbangan kekuatan antara Pyongyang dengan Amerika Serikat.

Selain itu, *deterrence* yang digunakan Korea Utara melalui kebijakan nuklirnya juga digunakan sebagai langkah defensif Pyongyang dalam menghadapi aliansi Amerika Serikat. Hal ini memunculkan narasi yang dibuat oleh Korea Utara bahwa Amerika Serikat merupakan negara imperialis yang dapat mengancam keberlangsungan negaranya sehingga diperlukan tindakan-tindakan seperti uji coba rudal balistik dalam landasan kebijakan nuklir Pyongyang (Roberts, 2020).

Walaupun demikian, kebijakan nuklir Korea Utara yang terus-menerus dan bersifat agresif dengan alasan defensif dan *deterrence* justru mengganggu *balance of power* yang sebelumnya terbentuk di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan senjata nuklir Korea Utara menimbulkan persepsi

ancaman bagi negara-negara sekitarnya, khususnya Korea Selatan dan Jepang. Adanya ancaman akan membuat kedua negara tersebut meningkatkan kapabilitas militernya dan memperkuat relasi pertahanan dengan Amerika Serikat. Kondisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menggertak oleh Korea Utara sehingga Korea Utara akan kembali berupaya meningkatkan kapabilitas militernya. Perlombaan kekuatan tersebut justru membuat kondisi kawasan menjadi tidak stabil karena masing-masing negara merasa cemas atas sikap negara lain dan rentan melakukan serangan militer terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Kondisi perlombaan kekuatan tersebut tidak terbatas pada Korea Utara dan aliansi Amerika Serikat, tetapi juga dapat memicu Tiongkok untuk turut meningkatkan kapabilitas militernya dan bersikap lebih tegas di kawasan. Saat ini, Tiongkok fokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga menghindari konflik langsung dengan negara-negara sekitarnya. Akan tetapi, meningkatnya kapabilitas dan keaktifan Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara di bidang militer dapat menjadi ancaman bagi Tiongkok, khususnya dalam isu Taiwan. Berkurangnya pengaruh Tiongkok di kawasan dapat menjadi jalan bagi Taiwan untuk memperoleh kedaulatannya. Oleh karena itu, Tiongkok akan berupaya untuk meningkatkan kekuatannya demi menghambat perluasan pengaruh negara-negara lainnya di kawasan. Hal-hal tersebut yang selanjutnya menyebabkan ketidakstabilan di kawasan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap Korea Utara dalam menggunakan kebijakan nuklirnya dapat dilihat melalui teori realisme defensif dan *balance of power*.

Kebijakan nuklir Korea Utara yang terus-menerus dan bersifat agresif dengan alasan defensif dan *deterrence* dapat mengganggu *balance of power* yang ada di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut karena pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara akan memunculkan ancaman bagi negara-negara di sekitarnya, yang kemudian memberi respons dengan meningkatkan kapabilitas militernya. Perlombaan kekuatan tersebut justru membuat kondisi kawasan menjadi tidak stabil karena masing-masing negara merasa cemas atas sikap negara lain dan rentan melakukan serangan militer terlebih dahulu untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, N. U., & Yuniasih, T. (2020). Strategi nuclear deterrence Korea Utara terkait perkembangan militer di kawasan Asia Timur pada tahun 2018-2020. *Balcony*, 4(2), 147160.
- Ardhila, T. (2013). *Representasi pemerintah Korea Utara dalam pidato Barack Obama di Hankook University, Seoul: analisis wacana kritis* (Skripsi). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Atland, K. (2014). Interstate Relations in the Arctic: An Emerging Security Dilemma? *Comparative Strategy*, 33(2): 145-166.
- BBC News. (2020). *North Korea threatens to resume nuclear and ICBM testing*. Diunduh di <https://www.bbc.com/news/world-asia-50962768> 28 Januari 2022.
- CNN. (2006). *U.N. slaps trade, travel sanctions on North Korea*. Diunduh di <http://edition.cnn.com/2006/WORLD/asiapcf/10/14/nkorea.sanctions/> 28 Januari 2022.
- Congressional Research Service. (2021). *Nuclear Negotiations with North Korea*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Council on Foreign Relations. (2021). *North Korea's Military Capabilities*. Diunduh di <https://www.cfr.org/background/north-korea-nuclear-weapons-missile-tests-military-capabilities> 27 Januari 2022.

Ernst, M., & Kim, E. (2020). Economic Development Under Kim Jong-un: The added Value of Traffic Data and Established Indicators in the Study of North Korea's Economy. *North Korean Review*, 16(2): 26-48.

Friedman, U. (2017). North Korea Says It Has 'Completed' Its Nuclear Program. *The Atlantic*. Diunduh di <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/11/north-korea-nuclear/547019/> 28 Januari 2022.

Kim, J. (2006). The Security Dilemma: Nuclear and Missile Crisis on the Korean Peninsula. *Korean Journal of Defense Analysis*, 18(3): 89-106.

Kim, S. (2017). *North Korea's Nuclear Doctrine and Revisionist Strategy*. Washington: Georgetown University Press.

Larsen, M. S. (2021). Kim Jong Un: 10 years of missiles, murder and economic misery. *Al Jazeera*. Diunduh di <https://www.aljazeera.com/news/2021/12/17/kim-jong-un-10-years-of-missiles-murder-and-misery-for-n-korea> 21 April 2022.

Lee, D. S. (2008). A Nuclear North Korea and the Stability of East Asia: A Tsunami on the Horizon? *Australian Journal of International Affairs*, 61(4): 436-454.

Lestari, M., & Yuniyanto, T. (2013). Mahmoud Ahmadinejad (Studi Pemikiran dan Dampak Pemikiran Politik Tahun 2005-2012). *Candi*, 5(1), 1-19.

Mansourov, A. Y. (1995). The Origins, Evolution, and Current Politics of the North Korean Nuclear Program. *The Nonproliferation Review*, 25-38.

Moon, C.I., & Jeong, S. (2021). Is a Nuclear Domino Effect in Northeast Asia A Real Possibility? *Global Asia*, 16(2).

Mueller, K. P., Castillo, J. J., Morgan, F. E., Pegahi, N., & Rosen, B. (2006). *Striking First: Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy*.

Nasution, R. D. (2018). *Di balik ancaman Korea Utara: kajian tentang kebijakan luar negeri Korea Utara* (Skripsi). Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Nie, W. (2016). Xi Jinping's foreign policy dilemma: one belt, one road, or the South China Sea? *Contemporary Southeast Asia*, 38(3): 422-444.

Park, S. Y. (2015). North Korea's military policy under the Kim Jong-un regime. *Journal of Asian Public Policy*, 9(1): 57-74.

Purwono, A., & Zuhri, A. S. (2010). Peran nuklir Korea Utara sebagai instrumen diplomasi politik internasional. *Spektrum: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(2): 1-19.

Roberts, B. (2020). *Living With a Nuclear-Arming North Korea: Deterrence Decisions in a Deteriorating Threat Environment*. Washington D.C.: The Stimson Center.

Romashkina, N. P. (2007). North Korea and Iran's Nuclear Programs as Instability Factors in the New System of International Relations. *George C. Marshall European Center for Security Studies*. Diunduh di <https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/north-korea-and-iran-nuclear-programs-instability-factors-new-system-international-relations-0> 28 Januari 2022.

Shany, Y. (2012). Assessing the Effectiveness of International Courts: A Goal-based Approach. *American Journal of International Law*, 106(2): 225-270.

Syahrin, M. N. (2018). Donald Trump dan reorientasi kebijakan keamanan Amerika Serikat terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1): 97-111.

Tan, E., & Park, J. J. (2020) The US-North Korean asymmetrical security dilemma: Past the point of nuclear No. return? *Internasional Area Studies Review*, 1-16.

Tan, E.W. (2019). Source triangulation as an instrument of research on North Korea. *North Korean Review*, 15(1): 34-50.

Wakefield, B., & Hathaway, R. M. (2010). Revisiting History: North Korea and Nuclear Weapons. *Wilson Center*. Diunduh di <https://www.wilsoncenter.org/event/revisiting-history-north-korea-and-nuclear-weapons> 28 Januari 2022.